

Abstrak

Pemerintah menyusun Laporan Keuangan (LK) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Untuk memastikan tingkat keandalan LK, perundang-undangan mewajibkan adanya pemeriksaan LK yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan keuangan dilakukan dengan tujuan memberikan pernyataan opini atas kewajaran informasi yang disajikan oleh pemerintah. Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada tahun 2019, kemudian memperoleh opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020. Kenaikan opini ini mencerminkan peningkatan kualitas dari LK Bakamla. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK yang diberikan kepada Bakamla tahun 2019, mengetahui faktor penyebab BPK memberikan opini TMP pada LK Bakamla tahun 2019, mengetahui hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK yang diberikan kepada Bakamla tahun 2020, mengetahui faktor yang menyebabkan opini pada LK Bakamla tahun 2020 meningkat menjadi WTP. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai temuan yang teridentifikasi oleh BPK atas LK Bakamla pada tahun 2019. Faktor pemberian opini pada LK Bakamla tahun 2019, yaitu ketidaksesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketidakcukupan penyajian informasi LK, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan lemahnya sistem pengendalian intern. Tantangan utama Bakamla dalam memperoleh opini WTP adalah pengaruh budaya buruk pengelolaan keuangan dari instansi lain terhadap Bakamla. Peningkatan opini LK menjadi WTP dapat diperoleh karena Bakamla telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Kata kunci: laporan keuangan, opini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Abstract

The government prepares Financial Reports as financial management accountability. To ensure the level of reliability of Financial Reports, the law requires Financial Reports audits to be conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Financial audits are carried out to provide an opinion that describe the level of fairness of Financial Reports. The Indonesian Maritime Security Board (IMSB) received a Disclaimer Opinion in 2019, then obtained an Unqualified Opinion in 2020. This increasing in opinion indicates the quality of IMSB's Financial Reports improve through the year. This study purposed to determine the audit results and BPK's recommendations to IMSB's Financial Reports in 2019, to find out the factors of Disclaimer Opinion on IMSB's Financial Reports in 2019, to determine the audit results and BPK's recommendations to IMSB's Financial Reports in 2020, to find out the factors that led the increasing opinion to Unqualified Opinion on IMSB's Financial Reports in 2020. The analytical method used is qualitative analysis. The results of the study shows that

there are various audit findings on IMSB's Financial Reports in 2019. Factors of Disclaimer opinion on IMSB's Financial Reports in 2019 are incompatibility to Government Accounting Standards, inadequacy presentation of Financial Reports information, incompliance to laws and regulations, and ineffectiveness of internal control system. The major obstacle to obtain Unqualified Opinion is bad influence of other institution's culture to manage financial. The increasing opinion of IMSB's Financial Reports to Unqualified Opinion can be obtained due to accomplishment of BPK's recommendation on previous Financial Reports.

Keywords: financial report, opinion, Supreme Audit Agency (BPK), Audit Report